



Network: 9 Des 2025 12.54.20 WIB
Local: 9 Des 2025 12.54.19 WIB
1°21'13,65"S 100°34'33,19"E
76 Jalan Diponegoro
Painan
ai



2,119428S 101,041288E
267°



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) TAHUN 2025

DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen LKPj Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Bupati Pesisir Selatan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen LKPj Tahun Anggaran 2025 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

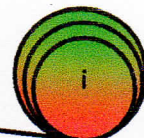
Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 19 Januari 2026

Rh. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



HENDRO KURNIAWAN, S.T.
NIP. 19760518 201101 1 002



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	8
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	8
2.2 Kebijakan Strategis.....	19
2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.....	20
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI DAN APBN.....	21
3.1 Identifikasi Progam dan Kegiatan APBD Provinsi dan APBN	21
3.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Provinsi dan APBN	22
BAB V PENUTUP.....	23



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.....	8
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Dalam Dokumen anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya.....	10
Tabel 2.3	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan.....	20
Tabel 2.4	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj) Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.....	20
Tabel 3.1	Alokasi Program/Kegiatan APBD Provinsi dan APBN Tahun 2025 Di Kabupaten Pesisir Selatan.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan kepada Kepala Daerah dan kemudian menyampaikan LKPj kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pertanian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPj tahun anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Pesisir Selatan. LKPj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025, kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 – 2026.

LKPj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 – 2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 27);
30. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
31. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

32. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/185/Kpts/BPT-PS/2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025; dan
33. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900.1.3/414/Distan/2025 tanggal 04 Juni 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900.1.3/21/Distan/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan LKPj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025 ini adalah memberikan pelaporan keterangan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Pesisir Selatan dibidang pertanian.

1.3.2 Tujuan

1. Mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan melalui pengawasan dari DPRD;
3. Tersusunnya LKPj tahun anggaran 2025 yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Pesisir Selatan; dan

4. Tersedianya informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui media massa yang tersedia di daerah.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Adapun dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran tahun 2025 Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran Rp.18.835.355.995 dengan realisasi sebesar Rp.18.498.426.190 dengan tingkat realisasi mencapai 98,21%. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Pertanian	A (89,98)	A (89,50)	99,47	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.993.127.625	17.139.080.029	16.890.801.788	98,55	Nilai AKIP Dinas Pertanian Tahun 2024
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas	91	92	101,10	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.136.612	5.168.662	-	-	
3.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian	3.16 Trilyun	3,09 Trilyun	97,78	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	123.590.000	128.110.150	117.772.974	91,93	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2024
						Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	977.567.800	970.967.800	951.122.253	97,96	
						Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	24.469.910	24.469.910	19.996.400	81,72	
						Perizinan Usaha Pertanian	33.296.226	33.296.226	26.544.395	79,72	
						Penyuluhan Pertanian	573.586.168	534.263.218	492.188.380	92,12	
Total					99,45		19.735.774.341	18.835.355.995	18.498.426.190	98,21	

Sumber : Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Capaian kinerja urusan masing-masing kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2025

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai Dalam Dokumen anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pertanian	Dinas Pertanian	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025					Tidak Ada	Tidak Ada	Akan melaksanakan koordinasi dengan instansi berwenang tingkat provinsi maupun pusat untuk menurunkan status Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Area Penggunaan Lainnya.
A				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE KELENGKAPAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI (%) KETEPATAN WAKTU PELAPORAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERSENTASE KINERJA BIDANG YANG TERCAPAI (%) JUMLAH INOVASI DINAS PERTANIAN (JENIS) PENINGKATAN NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH (%) PERSENTASE KINERJA BIDANG/SEKRETARIAT YANG DICAPAI (%) JUMLAH INOVASI (INOVASI)	20 0 Delay Pelaporan 91%-100% (Sangat Baik)	15 0 Delay Pelaporan 91%-100% (Sangat Baik)			
I				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD (Dokumen)	47 4 19 6 1 1	40 4 19 6 1 1			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4			
2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1			
3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1			
4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4			
5				Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	60	45			
II				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)	20	15			
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1			
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	13	13			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	158	158			
6				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	158	158			
7				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1			
8				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1			
III				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertibnya penatausahaan barang milik daerah SKPD (%)	25	18,75			
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1			
9				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1			
IV				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1			
10				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	30	0			
11				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12			
						1	1			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V				Administrasi Umum	Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti (%)	25	19			
					Persentase Dokumen Publik dan Dipublish (%)	97	73			
					Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran	25	19			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1			
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3			
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1			
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1			
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1			
12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1			
13				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1			
14				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1			
15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	3			
16				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12			
17				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250	250			
18				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1			
VI				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan (%)	20	15			
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2			
19				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	2			
VII				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)	20	15			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	9			
21				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	9			
VIII				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%)	20	15			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	160	160			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1			
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60	60			
22				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1			
23				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	156	117			
24				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60	60			
B				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)	535.308	0			
					PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENERAPKAN SOP (STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR) BUDIDAYA PERTANIAN (%)	53,61	0			
					PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN (KW/HA)	72,53	0			
					PERSENTASE TERNAK UNGGUL (%)	29,41	0			
					PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN (PERSENTASE)	2	0,77			
					PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA (PERSENTASE)	0,50	6,40			
					PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN (%)	2,80	1,68			
					PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN (%)	1	(2,59)			
					PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	58,06	61,23			
IX					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang dilakukan (laporan)	12	9		
				Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)		1	1			
25				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	15	10			
						1	1			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	15	10			
						1	1			
X				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan Yang Dimurnikan dan dilestarikan (Jenis)	6	3			
					Persentase Penggunaan Benih Unggul Pertanian (%)	70,58	0			
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	2	2			
26				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (Varietas Unggul Baru/VUB)	4	3			
						2	2			
XI				Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Ketersediaan Bibit Ternak Unggul (IB) (%)	45	0			
					Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	1450	1450			
27				Pengadaan Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Dosis)	10.500	1.450			
C				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)	535.308	0			
					JUMLAH INDEKS PERTANAMAN PER TAHUN (KALI)	1,88	0			
					PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT DAN RUMPUN/GALUR TERNAK (%)	25	12,50			
					PERSENTASE PENGADUAAAN/ SARAN SEKTOR PERTANIAN YANG DITINDAK LANJUTI (%)	25	12,50			
					CAKUPAN LUAS LAHAN PERTANIAN YANG DITETAPKAN MENJADI LP2B (HA)	22.746,10	22.746,10			
					LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/ KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (HA)	22.746,10	22.746,10			
					JUMLAH LUAS LAYANAN IRIGASI YANG DIREHABILITASI DAN DITINGKATKAN (HEKTAR)	500	50			
					INDEKS PERTANAMAN (ANGKA)	1,80	1,65			
XII				Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilindungi dari alih fungsi (Ha)	22.746	22.746			
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1			
28				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XIII				Pembangunan Prasarana	Persentase Lahan Sawah Beririgasi Baik (%)	75,93	0			
					Persentase Jalan Pertanian Berkondisi Baik (%)	89	0			
					Persentase Prasarana Pelayanan Pertanian Yang Berkondisi Baik (%)	69	0			
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	2	2			
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1			
29				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	25	0,60			
30				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	20	1			
						2	2			
D				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN PENYAKIT HEWAN/TERNAK (%)	4,68	0			
					PERSENTASE PRODUK PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL (ASUH) UNTUK DIKONSUMSI (%)	20	15			
					PERSENTASE WILAYAH YANG TERKENDALI DARI PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (%)	100	100			
					TINGKAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) (%)	100	100			
					PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR (%)	3,55	4,73			
					PERSENTASE UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PRA NKV ATAU NKV (NOMOR KONTROL VETERINER (PERSENTASE)	21,43	21,43			
XIV				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (PHM) (%)	4,76	0			
					Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dan Rabies (%)	3,45	0			
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	1	1			
31				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	15	11			
						1	1			
E				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	JUMLAH UNIT USAHA YANG DIBERIKAN REKOMENDASI IZIN USAHA (UNIT)	0	0			
					PERSENTASE USAHA PERTANIAN YANG MEMILIKI IZIN USAHA (%)	37,00	27,75			
					PERSENTASE IZIN USAHA PERTANIAN YANG DITERBITKAN (PERSENTASE)	100	100			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
XV				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	0											
					Jumlah Usaha Pertanian yang Mengajukan Permohonan Rekomendasi/ Daftar Izin Usaha (Unit)	12,00	0											
					Jumlah Usaha Pertanian yang diawasi (Unit)	160,00	120											
					Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	141	141											
32				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	160	121											
F				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	JUMLAH KELOMPOK TANI YANG NAIK KELAS (KELOMPOK)	100	0											
					JUMLAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN YANG NAIK KELAS (UNIT)	1	0											
					PERSENTASE SDM PENYULUH PERTANIAN YANG DITINGKATKAN (PERSENTASE)	13,10	13,1											
					PERSENTASE KELEMBAGAAN KOPERASI TANI YANG DIBENTUK DAN BEROPERASI (PERSENTASE)	80	80											
					PERSENTASE PENYULUH PERTANIAN YANG MEMILIKI NILAI EVALUASI KINERJA BAIK (%)	100	100											
XVI				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Percentase Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang Mampu Memenuhi 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) (%)	20	10											
					Percentase Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	41,58	0											
					Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.115	1.550											
					Percentase Sarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik (%)	87,00	0											
					Percentase Prasarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik (%)	88,13	0											
					Percentase Kelembagaan Tani Yang Menerapkan Paket Teknologi Anjuran (%)	0	0											
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1115	1300											
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15	15											
					33							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15	15			
					34							Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	1.115	1.300			

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator sasaran strategis ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian. Target indikator kinerja ini adalah 100%, tingkat capaian 99,47% yaitu dari target (A) 89,98 tercapai 89,50 (data capaian tahun 2024), yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Perubahan Renja, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Perubahan Renja serta kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Perubahan Renja dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan mendukung tercapainya kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, persentase kinerja bidang yang tercapai dan jumlah inovasi Dinas Pertanian. Nilai pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp.17.139.080.029 dengan realisasi anggaran Rp.16.890.801.788 atau 98,55%.

B. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian. Target indikator kinerja ini adalah 100%, tingkat capaian 101,10% yaitu dari target 91 tercapai 92 (data capaian tahun 2025), yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Perubahan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Perubahan Renja serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Perubahan Renja dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini bertujuan mendukung tercapainya kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, persentase kinerja bidang yang tercapai dan jumlah inovasi Dinas Pertanian. Nilai pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp.5.168.662 dengan realisasi anggaran Rp.0 atau sebesar 0,00%.

C. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) (Triliyun). Target kinerja indikator kinerja ini adalah 100%, tingkat capaian 97,78% yaitu dari target 3,10 triliyun tercapai 3,09 triliyun (data capaian Tahun 2024), yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Perubahan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Perubahan Renja serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Perubahan Renja dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian untuk meningkatkan jumlah produksi pertanian, persentase kelompok tani yang menerapkan sop (standar operasional prosedur) budidaya pertanian, produktivitas pertanian per hektar per tahun dan persentase ternak unggul. Nilai pagu anggaran sebesar Rp.128.110.150 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.117.772.974 atau sebesar 91,93%.

b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan pembangunan prasarana pertanian. Nilai pagu anggaran sebesar Rp.970.967.800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.951.122.253 atau sebesar 97,96%.

c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan menekan perkembangan dan penyebaran penyakit hewan menular strategis dan pengawasan hewan dan produk hewan. Nilai pagu anggaran sebesar Rp.24.469.910 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.996.400 atau sebesar 81,72%.

d) Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah usaha pertanian yang memiliki izin usaha di sektor pertanian. Pagu anggaran sebesar Rp.33.296.226 dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp.26.544.395 atau 79,72%.

e) Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah Kelompok Tani naik kelas sebanyak 100 (seratus) unit dan Balai Penyuluh Pertanian yang naik kelas sebanyak 1 (satu) unit. Nilai pagu anggaran sebesar Rp.534.263.218 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.492.188.380 atau 92,12%.

2.2 Kebijakan Strategis

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Selama tahun 2025, Dinas Pertanian tidak ada mengeluarkan kebijakan strategis, seperti dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		NIHIL	

2.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun anggaran 2024

Sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, untuk Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai mana pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
29	Sehubungan dengan permasalahan lahan perkebunan di kawasan Inderapura, Tapan, Lunang, dan Silaut perlu kiranya Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang di Provinsi maupun Pusat agar dilakukan penurunan status dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Area Penggunaan Lainnya agar terdapat kepastian hukum bagi masyarakat yang sudah berkebun dilahan tersebut	Akan melaksanakan koordinasi dengan instansi berwenang tingkat provinsi maupun pusat untuk menurunkan status Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Area Penggunaan Lainnya.	Untuk mendapatkan kepastian hokum status lainnya yang dikelola masyarakat.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD
PROVINSI DAN APBN

3.1 Identifikasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi dan APBN

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 mendapatkan alokasi program dan kegiatan berupa penyaluran barang dari Provinsi dan Pusat yang meliputi bantuan benih/bibit tanaman, bibit ternak, alat dan mesin pertanian serta infrastruktur pertanian. Alokasi bantuan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Program/Kegiatan APBD Provinsi dan APBN Tahun 2025 Di
Kabupaten Pesisir Selatan

No (1)	Program/Kegiatan (2)	Volume (3)	Satuan (4)	Sumber Dana (5)
1	Bantuan Benih Padi Inbrida Lokasi Reguler Tahap 1	890	Ha	APBN
2	Bantuan Benih Padi Inbrida Lokasi Reguler Tahap 2	520	Ha	APBN
3	Bantuan Benih Padi Inbrida Reguler Lokasi Optimasi	1.024	Ha	APBN
4	Bantuan Benih Padi Lahan Kering	187	Ha	APBN
5	Bantuan Benih Padi Inbrida Reguler Wilayah KSA	1.080	Ha	APBN
6	Bantuan Benih Jagung Hibrida Reguler	1.170	Ha	APBN
7	Bantuan Benih Jagung Hibrida Reguler	1.000	Ha	APBN
8	Bantuan Benih Jagung Hibrida Reguler	7.000	Ha	APBN
9	Bantuan Benih Jagung Hibrida Reguler	857	Ha	APBN
10	Bantuan Power Thresher	6	Unit	APBN
11	Bantuan Combine Harvester Besar	2	Unit	APBN
12	Bantuan Cultivator	1	Unit	APBD Provinsi
13	Bantuan Tractor Roda 2 8,5 PK	9	Unit	APBD Provinsi
14	Bantuan Hidrotiller	2	Unit	APBD Provinsi
15	Bantuan Pompa Air 3 Inchi	3	Unit	APBD Provinsi
16	Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	4	Unit	APBD Provinsi
17	Bantuan Handsprayer	27	Unit	APBD Provinsi
18	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	23	Unit	APBD Provinsi
19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	13	Unit	APBD Provinsi
20	Bantuan Tractor Roda 4	2	Unit	APBN
21	Bantuan Handsprayer	17	Unit	APBN
22	Bantuan Tractor Roda 2 Rotary	2	Unit	APBN
23	Bantuan Ternak Itik	1.000	Ekor	APBD Provinsi
24	Bantuan Ayam KUB	1.000	Ekor	APBD Provinsi
25	Bantuan Ayam Ras Petelur	6.000	Ekor	APBN
26	Bantuan Bibit Kelapa Sawit	14.500	Batang	APBD Provinsi
27	Bantuan Bibit Cengkeh	13.000	Batang	APBD Provinsi
28	Bantuan Bibit Gambir	600	Batang	APBD Provinsi
29	Alsintan dan Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1	Unit	APBD Provinsi
		1	Unit	
30	Bantuan Bibit Pala	12.500	Batang	APBN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2025

No (1)	Program/Kegiatan (2)	Volume (3)	Satuan (4)	Sumber Dana (5)
31	Brigade Pangan	55	Unit	APBN
32	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (Optimasi Lahan)	8.648,80	Ha	APBN
33	Rehabilitasi Dam Parit (Optimasi Lahan)	367,83	Ha	APBN
34	Embung (Optimasi Lahan)	19,52	Ha	APBN
35	Pipanisasi (Optimasi Lahan)	321,66	Ha	APBN
36	Pompanisasi (Optimasi Lahan)	480,67	Ha	APBN
37	Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal (JIAD-Optimasi)	1.024,53	Ha	APBN
38	Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)	117,01	Ha	APBN
39	Sarana dan Prasarana (Sapras) Jalan Usaha Tani (PSR)	1	Unit	APBN

Sumber: Bagian Sekretariat, tahun 2025

3.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Provinsi dan APBN

Hambatan yang dialami dalam memfasilitasi program/kegiatan APBD Provinsi dan Pusat adalah:

- a) Masih ditemukan ketidakcocokan calon petani calon lokasi yang ditetapkan provinsi dan pusat setelah dilakukan verifikasi lapangan; dan
- b) Kedatangan bantuan tidak sesuai dengan jadwal tanam petani dilapangan;

BAB IV

PENUTUP

LKPj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan pertanian selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan pertanian.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pertanian berjalan optimal yang merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen masyarakat tani yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan pertanian. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pembangunan pertanian pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pembangunan pertanian pada tahun anggaran 2025 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan khusus para petani/kelompok tani/gapoktan/KEP dan stakeholder yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pembangunan pertanian dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPj ini. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan pertanian tahun 2025 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian LKPj Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025, dengan harapan semoga kinerja pembangunan pertanian senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua, Aamiin yarabbal alamiin.